

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2005 menetapkan standar pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Pasal 3 PP 19 Tahun 2005). Selanjutnya dalam Pasal 4 PP 19 Tahun 2005 disebutkan Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana ada dalam pasal 2 PP Nomor 19 Tahun 2005 meliputi: a) standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; b) standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; c) standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; d) standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik

maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; e) standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; f) standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; g) standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan h) standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dari kedelapan standar nasional pendidikan beberapa diantaranya telah ditetapkan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Khusus tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional telah membuat beberapa peraturan antara lain.

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Sekolah/Madrasah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

### Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.

Tujuan pemerintah membuat semua peraturan di ruang lingkup pendidikan di atas untuk menentukan standar minimal yang harus diupayakan dipenuhi oleh setiap stake holder pendidikan khususnya setiap individu yang terkait langsung dengan peraturan tersebut. Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan disekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk itulah penelitian ini tertarik untuk mengkaji sumber daya manusia di sekolah yaitu kepala sekolah dan guru. Menurut Sudarwin Danim, salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru yang belum mampu menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Terkait kompetensi guru, berdasarkan catatan Human Development Index (HDI), 50 persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas standar. Fakta ini menunjukkan, kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar. Dari data statistik HDI, terdapat 60 persen guru SD, 40 persen SLTP, 43 persen SMA, 34

persen SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2 persen atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Seharusnya fakta ini dapat diminimalkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dimana didalam Permendiknas tersebut terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru sehingga dengan penguasaan kompetensi ini diharapkan kinerja guru meningkat.

Selain guru, kepala sekolah juga merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu/unggul. Hechinger (1981:5) memperlihatkan hubungan erat antara mutu sekolah dengan kepala sekolah, sebagaimana dikemukakannya bahwa:

*I have never seen a good school with a poor principal or a poor school with a good principal. I have seen unsuccessful schools turned into successful ones and, regrettably, outstanding schools slide rapidly into decline. In each case, the rise or fall could readily be traced to the quality of the principal.*

Prestasi sekolah sangat bergantung kepada kompetensi kepala sekolah juga disebutkan Imron Arifin (1998) dalam disertasinya yang berjudul "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Berprestasi". Namun Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan 70 persen dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten (Tempo, 12 Agustus 2008). Fenomena tersebut merupakan sesuatu yang memprihatinkan, bagaimana proses pendidikan di sekolah yang telah berjalan selama ini diserahkan pengelolaannya kepada seseorang yang tidak kompeten. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional selanjutnya

menindaklanjuti PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan Standar Kepala Sekolah/Madrasah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007. Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2007. Lima kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kelima dimensi kompetensi tersebut dijabarkan ke dalam 33 kompetensi.

Dari hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kinerja guru yang dipengaruhi oleh tiga kompetensi kepala sekolah yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Hal ini disebabkan karena ketiga kompetensi ini yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tidak hanya harus dimiliki oleh kepala sekolah tetapi sebaiknya dimiliki setiap orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kompetensi manajerial kepala sekolah di SD Negeri kota Banjarbaru ?
2. Bagaimana gambaran kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di SD Negeri kota Banjarbaru ?

3. Bagaimana gambaran kompetensi supervisi kepala sekolah di SD Negeri kota Banjarbaru ?
4. Bagaimana gambaran kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru?
5. Bagaimana pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru?
6. Bagaimana pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru?
7. Bagaimana pengaruh kompetensi supervisi terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru?
8. Bagaimana pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru?
9. Bagaimana pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, usia, masa kerja dan jam mengajar terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui gambaran kompetensi manajerial kepala sekolah di SD Negeri kota Banjarbaru.
2. Ingin mengetahui gambaran kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di SD Negeri kota Banjarbaru.
3. Ingin mengetahui gambaran kompetensi supervisi kepala sekolah di SD Negeri

kota Banjarbaru.

4. Ingin mengetahui gambaran kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.
5. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.
6. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi kewirausahaan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.
7. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.
8. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri Kota Banjarbaru.
9. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, usia, masa kerja dan jam mengajar terhadap kinerja guru di SD Negeri Kota Banjarbaru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai sumbangan informasi bagi SD Negeri di kota Banjarbaru tentang pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru.

- b. Dengan mengetahui tentang pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru, diharapkan kebijakan yang diambil dalam peningkatan kinerja guru akan lebih mempertimbangkan aspek-aspek kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Dengan ditemukannya pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri kota Banjarbaru, diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap ilmu pendidikan, sehingga dapat memperkaya studi tentang pengaruh beberapa faktor terhadap kinerja guru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh para peneliti yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja guru.

## E. Asumsi

Arikunto (2002:60-61) mengemukakan bahwa asumsi-asumsi atau anggapan dasar penelitian dipandang sebagai landasan teori atau titik tolak pemikiran yang digunakan dalam suatu penelitian, yang mana kebenarannya diterima oleh peneliti. Selanjutnya dikemukakan bahwa, peneliti dipandang perlu merumuskan asumsi-asumsi penelitian dengan maksud: (1) agar terdapat landasan

berpijak yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti; (2) mempertegas variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian; dan (3) berguna untuk kepentingan menentukan dan merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan asumsi-asumsi penelitian ini ditempuh melalui telaah berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan kompetensi kepala sekolah terhadap kinerja guru.

Asumsi yang melandasi penelitian ini adalah : Kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi merupakan kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu sekolah pada umumnya dan kinerja guru pada khususnya. Hal ini dikarenakan jika kepala sekolah mempunyai kompetensi manajerial yang baik maka ia akan memiliki kemampuan untuk mengelola sekolah. Selain itu, jika kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan yang baik maka ia akan mampu menciptakan inovasi dan memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah. Kompetensi supervisi juga harus dimiliki oleh kepala sekolah, jika kompetensi supervisi kepala sekolah baik maka diharapkan terdapat peningkatan profesionalisme guru. Pada akhirnya, dengan kompetensi kepala sekolah yang baik maka kinerja guru akan baik pula.

#### **F. Hipotesis**

Untuk menjawab sementara pertanyaan di atas maka diajukan hipotesis :

1. Kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.
2. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.

3. Kompetensi supervisi kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru
4. Kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.
5. Kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, usia, masa kerja dan jam mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SD Negeri kota Banjarbaru.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif karena akan menggambarkan, mengukur dan menganalisis bagaimana hubungan dan pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi terhadap kinerja guru dengan dan tanpa variabel kontrol usia, masa kerja dan jam mengajar.

#### **H. Lokasi dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan membatasi pada Sekolah Dasar Negeri di kota Banjarbaru yang berjumlah 30 sekolah. Responden penelitian adalah kepala sekolah. Jumlah SD Negeri di kota Banjarbaru adalah 70 sekolah.